

NAMA ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	CAPAIAN KINERJA 2019	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	1	Cakupan Rumah Layak Huni	<b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah diwilayah pemda x 100% <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90,91	92,12	89,53	97,20
2	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	2	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	<b>Formulasi Perhitungan :</b> Luas lingkungan permukiman kumuh/ luas wilayah <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,006	0,00	0,006	94,00
		3	Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga	<b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah rumah tangga pengguna air bersih/ Jumlah seluruh rumah tangga x 100% <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,88	100,00	85,39	85,39

Tenggarong, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Ir. Ahyani Fadianur Diani, MM  
 Nip. 19660212 199403 1 009



## PENJELASAN TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENDAHULUAN

#### PENJELASAN TEKNIS

1. Indikator Kinerja Utama Cakupan Rumah Layak Huni adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%.

Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni. Untuk data RTLH berdasarkan data BDT. Jadi untuk nilai capaian tahun 2018 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Rumah Layak Huni} &= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100 \\ &= \frac{163.975}{183.156} \times 100 \\ &= 89,53 \% \end{aligned}$$

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk cakupan rumah layak huni mengalami penurunan sebesar 1,38% dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 90,91% dan pada tahun 2019 menjadi 89,53 dengan persentase capaian sebesar 97,19%. Hal ini dipengaruhi jumlah data rumah tidak layak huni yang ada di kementerian tidak dapat diperbaharui karena tidak tersedianya data rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh CSR maupun swadaya masyarakat, baik itu berupa dokumentasi maupun surat keterangan/pernyataan. Namun disisi lain dengan ada pula peningkatan data jumlah rumah tidak layak huni melalui aplikasi E-RTLH yang dilakukan oleh masing-masing pokja kecamatan.

Di tahun 2019 ini pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Kecamatan Sebulu untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana APBD. Adapun jumlah bantuannya sebanyak 64 Unit yang terdiri 3 Desa yaitu Desa Sanggulan, Desa Senoni dan Desa Selerong.

Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan KOTAKU (Loa Janan Ulu).

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Bedah Rumah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Program

Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bedah Rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1.250.000.000	1.226.706.400
2	Pengembangan Perumahan	Fasilitasi/Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	325.000.000	232.083.700

2. Indikator Kinerja Utama Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh adalah Luas Lingkungan Permukiman Kumuh / Luas Wilayah

Capaian Lingkungan Permukiman Kumuh =  $\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}}$

$$= \frac{168,11}{27.263,10}$$

$$= 0,006 \%$$

Untuk cakupan lingkungan permukiman kumuh mengacu kepada SK Bupati Nomor : 454/SK-BUP/HK/2019, Tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ada 8 (delapan) kecamatan dan 11 Desa yang menjadi sasaran program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dengan total luas kawasan 168,11 Hektar. Adapun 8 (delapan) Kecamatan tersebut antara lain yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggaraong, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Janan. Sedangkan 11 Desa yang ditangani adalah Kel. Kuala Samboja, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Badak Baru, Desa Loa Kulu Kota, Kel. Loa Ipuh, Kel. Melayu, Kel. Mangkurawang, Desa Manunggal Jaya, Desa Teluk Dalam, Kel. Muara Jawa Pesisir dan Desa Loa Janan Ulu.

Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 dari segi penanganan mengalami peningkatan lebih kurang 25,46 ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 yang hanya sebesar 15,1 ha. Hal ini dipengaruhi oleh program kegiatan KOTAKU dan kegiatan DAK perumahan yang sumber dananya berasal dari APBN. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya sinergitas dari semua pihak baik oleh pemerintahan desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dimana semua berperan dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Walaupun demikian masih ada hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang, kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kab Kutai Kartanegara (Desa Loa Janan Ulu) dan Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Lingkungan Sehat Perumahan			
1		Penanganan Kumuh Kel. Mangkurawang	214.132.000,-	214.132.000,-
2		Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kab Kutai Kartanegara (Desa Loa Janan Ulu)	373.520.000,-	373.520.000,-
3		Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh	198.374.000,-	198.374.000,-

3. Indikator Kinerja Utama Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga adalah Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah seluruh rumah tangga x 100%.

Sumber data berasal dari bidang penyehatan lingkungan DPKP, PDAM Tirta Mahakam Tahun 2019 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan asumsi perhitungan 1 SR=6 Jiwa.

Persentase cakupan layanan air minum rumah tangga

=  $\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$

Jumlah seluruh rumah tangga

=  $\frac{190.003 \times 100}{222.503}$

222.503

= 85,39 %

Untuk Indikator Kinerja persentase cakupan layanan air minum rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 84,88% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 85,39% dengan persentase capaian sebesar 85,39%. Walaupun persentase capaian meningkat setiap tahunnya, tapi masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Karena perencanaan yang telah disusun sebagian besar masih belum terakomodir. Ketersediaan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kebutuhan, sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin bertambah. Apalagi

dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 18 Kecamatan tentu membutuhkan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit.

Capaian indikator kinerja pelayanan air minum di perkotaan dan di perdesaan ini juga dipengaruhi oleh program/kegiatan antara lain :

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK serta Fasilitas/Pendampingan baik DAK Reguler maupun Penugasan serta selain itu juga kegiatan yang berasal dari BANKEU, Pamsimas dan CSR.

Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut bukan hanya menggunakan sumber dana dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tetapi juga didukung oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN serta BANKEU.

Di tahun 2019 program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti yang terdapat di dalam matrik berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
1	Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III	700.000.000	627,409,000

Tenggarong, Februari 2020

Kepala

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Ir. Ahyani Fadianur Diani, MM

Nip. 19660212 199403 1 009

